

ABSTRAK

Dalam dunia pariwisata terdapat sebuah term baru yaitu pariwisata tematik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat saat ini. Sementara itu, secara geografis dan administratif kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata yang melimpah tercatat kurang lebih puluhan wisata. Ditinjau dari landasan perundang-undangan kabupaten sumenep memiliki 2 peraturan perundang-undangan Perda Nomor 4 tahun 2018 dan Perbup Nomor 63 tahun 2021. Dikarenakan sebagai sebuah term baru dan di kabupaten Sumenep masih belum ada yang menerapkan beserta peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul pembentukan peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten Sumenep. Penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu ; Bagaimana dasar normatif pembentukan model pariwisata tematik di Kabupaten Sumenep ?, dan Bagaimana materi muatan yang harus terkandung dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang wisata tematik di Kabupaten Sumenep?. Sementara itu, penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansi dan implementasinya terhadap penerapan model pariwisata tematik di Daerah Sumenep. Pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut *statute approach, conseptual approach, comparative approach, and analytical approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar normatif dalam pembentukan peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten sumenep ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. sementara materi muatan yang perlu diperhailkan dalam peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten sumenep ialah Asas, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Wisata Tematik, Penetapan Wisata Tematik, Pengelolaan Wisata Tematik, dan Larangan. Pembentukan peraturan perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap

peraturan di atasnya. Serta perlunya panduan dalam penyusunan peraturan daerah yang merupakan badan otonom daripada pemerintah pusat. materi muatan yang harus terkandung dalam penyusunan perda yakni dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta harus ada prinsip dan penetapan pada wisata tematik serta ditekankannya kreativitas pengelola wisata.

Kata kunci; *Pariwisata Tematik, dan Peraturan Daerah, dan Kabupaten Sumenep*

ABSTRACT

In the world of tourism there is a new term, namely thematic tourism which is an attraction for people today. Meanwhile, geographically and administratively, Sumenep regency has abundant tourism potential, recorded approximately dozens of tourism. Judging from the basis of legislation, Sumenep Regency has 2 laws and regulations: Regional Regulation Number 4 of 2018 and Perbup Number 63 of 2021. Because as a new term and in Sumenep regency there is still no one who applies the laws and regulations. Therefore, the author tried to conduct the research with the title of the formation of regional regulations regarding thematic tourism in Sumenep district. This research produces two formulations of problems that will be the focus of this research, namely; What is the normative basis for the formation of a thematic tourism model in Sumenep Regency?, and What is the content material that must be contained in the Formation of a Draft Regional Regulation on thematic tourism in Sumenep Regency?. Meanwhile, this study emphasizes aspects of legal normativeness. The method used is a normative research method by trying to approach through full reading and maximum analysis of laws and regulations as well as their relevance and implementation to the application of thematic tourism models in the Sumenep Region. The approaches used are as follows statute approach, conceptual approach, comparative approach, and analytical approach. The results of this study show that the normative basis in the formation of regional regulations regarding thematic tourism in Sumenep Regency is Law Number 10 of 2009 concerning tourism and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. While the content material that needs to be considered in the Regional Regulations regarding Thematic Tourism in Sumenep Regency is Principles, Functions and Objectives, Thematic Tourism Principles, Thematic Tourism Determination, Thematic Tourism Management, and Bans. The formation of regulations requires harmonization and synchronization of the regulations above. As well as the need for guidance in the preparation of regional regulations which are autonomous bodies rather than the central government. The

content material that must be contained in the preparation of regional regulations is in the context of implementing regional autonomy and there must be principles and stipulations on thematic tourism and emphasize the creativity of tourism managers.

Keywords; *Thematic Tourism, and Regional Regulations, and Sumenep Regency*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sumber Bahan Hukum	14
1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.9 Analisis Bahan Hukum	16

BAB II PENGERTIAN DAN TEORI PENERAPAN PARIWISATA

TEMATIK MELALUI PERATURAN DAERAH

2.1 Pengertian Pariwisata Tematik	17
2.2 Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah	22
2.2.1 Peraturan Perundang-Undangan	22
2.2.2 Peraturan Daerah	25
2.3 Teori Kewenangan, Otonomi Daerah, dan Tujuan Hukum.....	32
2.3.1 Teori Kewenangan	32
2.3.2 Otonomi Daerah	38
2.3.3 Tujuan Hukum	40

BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PARIWISATA

TEMATIK DI KABUPATEN SUMENEP

3.1 Dasar Normatif Pembentukan Peraturan Daerah Pariwisata Tematik Di Kabupaten Sumenep.....	44
3.1.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	44
3.1.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	47
3.2 Materi Muatan Yang Ter g Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pariwisata Tematik Di Kabupaten Sumenep	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
----------------------	----

4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61